

Volume 1, No. 1, September 2022

PENGARUH BELANJA PEMERINTAH, UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA PROVINSI ACEH

Rauzatul Fahira¹⁾, Devi Andriyani²⁾

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh

¹rauzatul.180430059@mhs.unimal.ac.id

Corresponding author : ²deviandriyani@unimal.ac.id

ABSTRACT

This study examined the effect of government expenditures on education, provincial minimum wages, and employment on the per capita income of Aceh province during 2001-2020. This study used secondary data for 20 years. This study used the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) analysis method to analyze the data. The results indicated that in the short term, government expenditure on education and the provincial minimum wage positively but insignificantly influenced per capita income, and labor absorption negatively but insignificantly influenced per capita income. In the long term, government expenditure on education positively but insignificantly influenced per capita income, provincial minimum wage positively and significantly influenced per capita income, and employment negatively but insignificantly affected per capita income

Keywords: *Government Expenditure on Education, Provincial Minimum Wage, Labor Absorption, Per capita Income, ARDL*

ABSTRAK

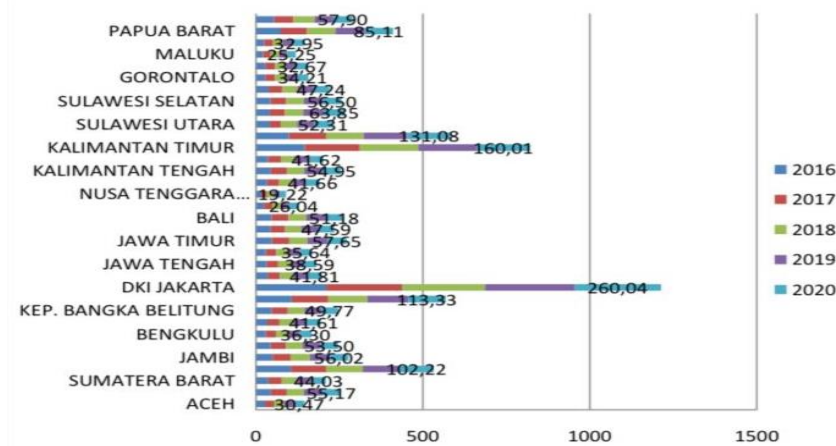
Penelitian ini mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, upah minimum provinsi, dan lapangan kerja terhadap pendapatan per kapita provinsi Aceh selama tahun 2001-2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder selama 20 tahun. Penelitian ini menggunakan metode analisis Autoregressive Distributed Lag (ARDL) untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan upah minimum provinsi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan per kapita, dan penyerapan tenaga kerja berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan per kapita. Dalam jangka panjang, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan per kapita, upah minimum provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita, dan lapangan kerja berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pendapatan per kapita

Kata Kunci : *Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan, Upah Minimum Provinsi, Penyerapan Tenaga Kerja, Pendapatan Per kapita, ARDL*

PENDAHULUAN

Pendapatan perkapita (*per capita income*) merupakan perluasan pendapatan normal penduduk di suatu negara. Pada umumnya, pendapatan per kapita diikuti oleh peningkatan kemakmuran penduduk, efisiensi, kesempatan kerja, dan juga penyaluran pendapatan. Pendapatan per kapita juga merupakan penunjuk yang digunakan untuk menentukan tingkat kemajuan ekonomi suatu negara (Kurniati, 2018).

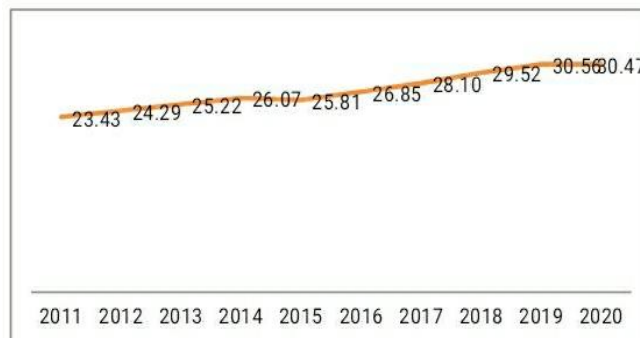
Berikut adalah gambar pendapatan perkapita Provinsi-Provinsi di Indonesia selama 5 tahun terakhir.



Gambar 1

Laju Pendapatan Perkapita Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2020

Dari gambar 1 tersebut dapat dilihat bahwa Provinsi Aceh menduduki peringkat ke 28 untuk pendapatan perkapita tertinggi dan peringkat ke 7 dari pendapatan perkapita terendah. Provinsi Aceh merupakan provinsi dengan biaya hidup ke tujuh terendah dan tingkat pendapatan perkapita ke tujuh terendah di antara Provinsi lainnya di Indonesia (Susenas, 2020). Dari grafik 1, pendapatan perkapita Provinsi Aceh sejak tahun 2016 selalu menjadi yang terendah dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Sumatera (BPS Aceh, 2021). Dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti pendapatan perkapita di Provinsi Aceh. Berikut adalah grafik laju pendapatan perkapita Provinsi Aceh selama 10 tahun terakhir.

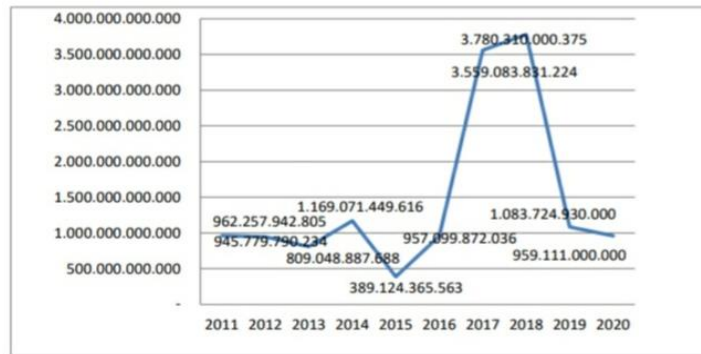


Gambar 2

Pendapatan Perkapita Provinsi Aceh Tahun 2011-2020

Melihat dari data BPS Aceh dari gambar 2, menunjukkan bahwa pendapatan perkapita Provinsi Aceh mengalami peningkatan yang fluktuatif. Dan pada tahun 2020 pendapatan perkapita juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dari 30,56 Juta menjadi 30,47 Juta.

Salah satu faktor membaiknya pendapatan perkapita yaitu sumber daya manusia (SDM) yang semakin berkualitas. Teori Adolf Wagner (2011) dalam (Aidar, 2014) mengatakan bahwa belanja pemerintah melalui pengeluaran pemerintah untuk membiayai pendidikan berhubungan dan akan berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita yang akan menghasilkan para penerus bangsa dengan pendidikan yang baik dan sumber daya manusia yang berpotensi. Jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.3 berikut.

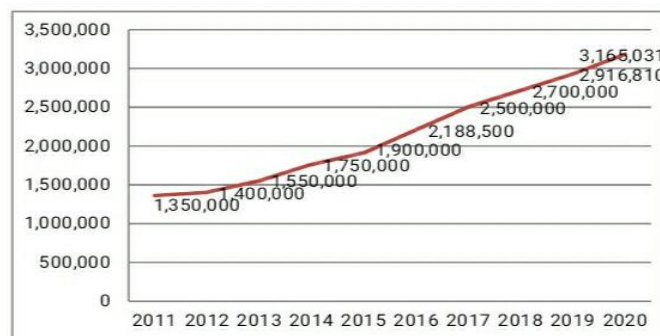


Gambar 3

Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan Provinsi Aceh Tahun (2011-2020)

Melihat dari data BPS Aceh dari gambar 3 belanja pemerintah bidang pendidikan Provinsi Aceh selama 10 tahun terakhir terdapat fenomena mengalami peningkatan dan penurunan yang fluktuatif. Hal ini tentu tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Adolf Wagner (2011). Tetapi fenomena tersebut sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh Jamaludin; HijriJuliansyah (2020) yang menyatakan bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita.

Dalam teori Pratomo, Devanto (2011) menjelaskan bahwa upah minimum provinsi juga menjadi salah satu indikator bagi pendapatan perkapita sebagai tolak ukur kesejahteraan penduduk. Berikut adalah gambar grafik Pertumbuhan upah minimum Provinsi Aceh.

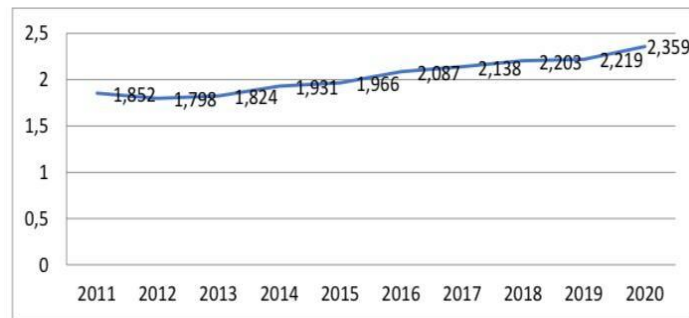


Gambar 4

Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun (2011-2020)

Melihat dari data BPS Aceh dari gambar 1.4 tersebut bahwa upah minimum provinsi selama 10 tahun terakhir mengalami peningkatan. Fenomena ini tentu sesuai dengan teori Pratomo, devanto (2011). Dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasbi et al., (2019) yang menyimpulkan bahwa upah minimum provinsi memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita.

Selanjutnya jumlah tenaga kerja yang diserap juga ikut mempengaruhi pendapatan perkapita. Menurut Naeruz dkk (2020), mengemukakan bahwa penyerapan tenaga kerja mempengaruhi pendapatan perkapita yaitu semakin banyak tenaga kerja yang diserap akan mengurangi tingkat pengangguran dengan banyaknya lapangan kerja yang tersedia meningkatkan tingkat pendapatan perkapita. Berikut adalah grafik tingkat penyerapan tenaga kerja Provinsi Aceh.



Gambar 5

Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Aceh Tahun (2011-2020)

Melihat dari data BPS Aceh dari gambar 1.5 dapat dilihat bahwa penyerapan tenaga kerja Provinsi Aceh 10 tahun terakhir berfluktuatif. Fenomena ini tentu tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Naeruz dkk (2020). Tetapi fenomena tersebut sesuai penelitian yang dilakukan oleh (Junaedi, 2016) dengan hasil penelitian bahwa penyerapan tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan perkapita.

Melihat dari deskripsi, permasalahan, dan juga fenomena tersebut maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Belanja Pemerintah, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Perkapita Provinsi Aceh”**.

Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita atau PDRB per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk pada suatu daerah atau total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam kurun waktu tertentu. Pendapatan perkapita merupakan bentuk rata-rata yang diperoleh dari pembagian jumlah Produk Nasional Bruto (PNB) oleh jumlah keseluruhan penduduk (Darmayanti & Rustariyuni, 2019).

Belanja Pemerintah

Belanja pemerintah merupakan suatu bagian dari kebijakan fiskal, hal ini termasuk kedalam suatu kebijakan pemerintah yang mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dari dokumen Anggaran Pendapatan belanja Negara untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk daerah atau regional (Maulina & Andriyani, 2020).

Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan

Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan merupakan jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang mejadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang pendidikan. Belanja pemerintah dalam mendanai pendidikan juga merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang dengan tujuan untuk pengembangan pendidikan. yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan semua jenis penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (Wallace et al., 2016).

Upah Minimum Provinsi (UMP)

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2015, Upah Minimum adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Upah Minimum Provinsi adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya (Susanti, 2019).

Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan Tenaga Kerja merupakan penerimaan tenaga kerja untuk melakukan tugas (pekerjaan) atau suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan pekerjaan untuk siap diisi oleh para pencari pekerjaan. penyerapan tenaga kerja juga merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Hidayat, 2021).

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian dan Lokasi Penelitian

Objek yang ingin diteliti dalam penelitian ini yaitu Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Penyerapan Tenaga Kerja sebagai variabel independent, sedangkan Pendapatan Perkapita sebagai variabel dependent. Penelitian ini dilakukan pada provinsi Aceh.

Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dimana data yang diperoleh ditampilkan dalam bentuk angka dan analisis menggunakan metode ekonometrika dan statistika. Penelitian ini menggunakan data *time series* dengan metode ARDL dari tahun 2001-2020 yang bersumber dari Badan Pusat Statistika Provinsi Aceh.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan menggunakan metode ARDL, yaitu data time series (deret waktu). Metode ARDL dalam mengolah data yaitu bisa mengetahui bagaimana variabel independen (variabel bebas) dapat mempengaruhi variabel dependen (variabel terikat) (Gujarati & Porter, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Stasioneritas

Syarat untuk berlakunya ARDL adalah apabila data stasioner pada ordo yang sama, level ataupun first different (Fadhilah Nu, 2017). Jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Uji Unit Root Test Philips-Perront

Variabel	Unit Root	Philip-Perron test statistic	critical Value 5%	Prob PP	Keterangan
Pendapatan Perkapita	Level	7.892093	-1.9882	0.8155	Tidak Stasioner
	First Diff	-1.26042	-1.99587	0.0030	Stasioner
Belanja Pemerintah bidang pendidikan	Level	-0.94385	-1.9882	0.2005	Tidak Stasioner
	First Diff	-2.86737	-1.99587	0.0001	Stasioner
Upah Minimum Provinsi	Level	9.056703	-1.9882	0.1302	Tidak Stasioner
	First Diff	0.366696	-1.99587	0.0001	Stasioner
Penyerapan Tenaga Kerja	Level	3.460845	-1.9882	0.0377	Tidak Stasioner
	First Diff	-1.1208	-1.99587	0.0000	Stasioner

Dari tabel 1 Uji Unit Root Test Philips-Perront dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini stasioner pada first different dengan menggunakan regresi konstan (Intercep) pada level 1%, 5%, dan 10%. Dimana nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 (Prob < 0,05). Ini bermakna bahwa semua variabel dapat dilanjutkan pengujian menggunakan first different.

Penentuan Lag Optimum

Penentuan lag optimum dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut.

Tabel 2
Hasil Penentuan Lag Optimum

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-1047.982	NA	6.82e+45	116.8869	117.0847	116.9142
1	-982.2188	94.99120	2.87e+43	111.3576	112.3469	111.4941
2	-953.9598	28.25896*	1.03e+43*	109.9955*	111.7763*	110.2411*

Berdasarkan tabel 2 hasil penentuan lag optimum dalam penelitian terdapat pada lag kedua. Dimana pada lag ini terhimpun nilai terendah dari LR (sequential modified LR test statistic (each test at 5% level), FPE (Final Prediction Error), nilai AIC (Akaike Information Criterion), SC (Schwarz Criterion) dan nilai HQ (Hannan-Quinn Information Criterion) terletak pada lag kedua. Dan jika diakumulasikan maka jumlah bintang terbanyak terdapat pada lag 2 yang kemudian dapat disimpulkan bahwa lag optimum berada pada lag 2 (Fadhilah Nu, 2017).

Uji Kausalitas Granger

Uji Causalitas Granger dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut.

Tabel 3
Hasil Uji Kausalitas Granger

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
X1 does not Granger Cause Y	18	0.58223	0.5726
Y does not Granger Cause X1		3.27893	0.0703
X2 does not Granger Cause Y	18	1.39798	0.2819
Y does not Granger Cause X2		2.25267	0.1446
X3 does not Granger Cause Y	18	0.82945	0.4581
Y does not Granger Cause X3		3.80281	0.0501
X2 does not Granger Cause X1	18	10.0189	0.1023
X1 does not Granger Cause X2		1.67569	0.2252
X3 does not Granger Cause X1	18	7.51529	0.0068
X1 does not Granger Cause X3		0.30792	0.7402
X3 does not Granger Cause X2	18	0.51735	0.6079
X2 does not Granger Cause X3		11.7934	0.0712

Berdasarkan tabel 3 hasil uji kausalitas granger dapat dilihat bahwa variabel (X1) tidak memiliki hubungan searah terhadap variabel (Y) begitupun sebaliknya variabel (Y) tidak memiliki hubungan terhadap variabel (X1). Variabel (X2) tidak memiliki hubungan terhadap variabel (Y) begitupun sebaliknya variabel (Y) tidak memiliki hubungan terhadap variabel (X2). Variabel (X3) tidak memiliki hubungan terhadap variabel (Y) begitupun sebaliknya variabel (Y) tidak memiliki hubungan terhadap variabel (X3). Variabel (X2) tidak memiliki hubungan terhadap variabel (X1) begitupun sebaliknya variabel (X1) tidak memiliki hubungan terhadap variabel (X2). Variabel (X3) memiliki hubungan terhadap variabel (X1), sedangkan variabel (X1) tidak memiliki hubungan terhadap variabel (X3). Variabel (X3) tidak memiliki hubungan terhadap variabel (X2) begitupun sebaliknya variabel (X2) tidak memiliki hubungan terhadap variabel (X3).

Berdasarkan hasil uji kausalitas granger dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel tidak memiliki hubungan timbal balik antar variabel (granger causality). Hanya pada variabel penyerapan tenaga kerja (X3) terhadap belanja pemerintah bidang pendidikan (X1) yang memiliki granger causality dimana nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 atau $0,0068 < 0,05$. Hubungan dikatakan terjadi apabila pada tiap-tiap variabel memiliki hubungan 2 arah signifikan pada level 5% (probability $< 0,05$).

Uji Kointegrasi Bound Test

Pada pengujian ini jika terkointegrasi pada uji bound test maka penelitian ini menggunakan model Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) (Tanjung & Devi, 2013). Hasil pengujian bound test dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4
Uji Bound Test

F-Bounds Test		Null Hypothesis: No levels relationship		
Test Statistic	Value	Signif.	I(0)	I(1)
Asymptotic: n=1000				
F-statistic	12.64382	10%	2.37	3.2
k	3	5%	2.79	3.67
		2.5%	3.15	4.08
		1%	3.65	4.66
Finite Sample: n=35				
Actual Sample Size	17	10%	2.618	3.532
		5%	3.164	4.194
		1%	4.428	5.816

Berdasarkan tabel 4 diatas, hasil uji kointegrasi menunjukkan nilai F-Statistik sebesar 12.64382, yang berarti nilai F-Statistik $12.643821 > I0$ Bound baik pada tingkat signifikan 10%, 5%, 2.5%, dan 1%. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kointegrasi pada variabel-variabel dalam model yang diuji, sehingga adanya keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang pada variabel-variabel tersebut, maka model tersebut bisa dilanjutkan menggunakan metode ARDL.

Hasil Estimasi Model ARDL

Didalam Pengujian Model ARDL Sebagaimana telah disebutkan bahwa keunggulan ARDL adalah kemampuannya untuk mendeteksi dinamika jangka pendek maupun jangka panjang (Zaretta, 2019).

Pengujian Jangka Pendek

Pengujian jangka pendek dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut.

Tabel 5
Hasil Uji Jangka Pendek

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.*
Y(-1)	0.559759	0.253735	2.206075	0.0496
X1	0.678154	0.617582	1.098079	0.2956
X2	3.720787	8.817880	-0.421959	0.6812
X2(-1)	-2.718078	9.931374	-0.273686	0.7894
X2(-2)	12.40184	8.500482	1.458957	0.1725
X3	-7.408768	10.27124	-0.721312	0.4858
C	17618180	17468372	1.008576	0.3348

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji jangka pendek dapat diformulasikan sebagai berikut :
Pendapatan Perkapita = $17618180 + 0.678154 * X_1 + 3.720787 * X_2 - 7.408768 * X_3$

Adapun Interpretasi persamaannya adalah sebagai berikut:

1. Constanta = 17618180. Apabila belanja pemerintah bidang pendidikan, upah minimum provinsi dan penyerapan tenaga kerja bernilai konstan dalam jangka pendek maka pendapatan perkapita meningkat sebesar Rp176.181.80 per tahun.
2. Koefisien Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan (X_1) = 0.678154. Apabila belanja pemerintah bidang pendidikan meningkat sebesar 1 miliar dalam jangka pendek maka pendapatan perkapita di Provinsi Aceh akan meningkat sebesar Rp678.154.000 per tahun.
3. Koefisien Upah Minimum Provinsi (X_2) = 3.720787. Apabila upah minimum provinsi yang meningkat sebesar 1 juta dalam jangka pendek maka akan meningkatkan pendapatan perkapita Provinsi Aceh sebesar Rp3.720.787 per tahun.
4. Koefisien Penyerapan Tenaga Kerja (X_3) = -7.408768. Apabila penyerapan tenaga kerja meningkat sebesar 1 jiwa dalam jangka pendek maka pendapatan perkapita Provinsi Aceh menurun sebesar Rp7.408.768 per tahun.

Pembahasan Jangka Pendek

1. Variabel Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan (X_1) Terhadap Pendapatan Perkapita (Y)
Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan dalam jangka pendek berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan perkapita. Artinya setiap peningkatan belanja pemerintah bidang pendidikan dalam jangka pendek maka akan menyebabkan peningkatan pendapatan perkapita Provinsi Aceh. Hal ini sejalan dengan penelitian (Aidar, 2014) hasilnya belanja pemerintah sektor pendidikan memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan perkapita.
1. Variabel Upah Minimum Provinsi (X_2) Terhadap Pendapatan Perkapita (Y)
Pada variabel upah minimum provinsi dalam jangka pendek berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap pendapatan perkapita Provinsi Aceh. Dan hasil ini didukung oleh penelitian (Hasbi et al., 2019) dengan hasil penelitian bahwa upah minimum memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan perkapita di kabupaten Luwu Timur.
2. Variabel Penyerapan Tenaga Kerja (X_3) Terhadap Pendapatan Perkapita (Y)
Pada variabel penyerapan tenaga kerja dalam jangka pendek berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan perkapita. Hal ini menurut penulis dikarenakan jika lapangan usaha/ lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan para pencari kerja maka tenaga kerja yang diserap juga akan menurun yang berakibat menurunnya pendapatan perkapita. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Rony Kurniawan, 2016), dengan hasil penelitian penyerapan tenaga kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan perkapita.

Pengujian Jangka Panjang

Pengujian jangka Panjang dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut.

Tabel 6
Hasil Uji Jangka Panjang

Levels Equation
Case 2: Restricted Constant and No Trend

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	1.540416	1.723147	0.893955	0.3905
X2	13.54480	3.791842	3.572090	0.0044
X3	-16.82889	18.34505	-0.917353	0.3786
C	40019406	27639363	1.447913	0.1755

EC = Y - (1.5404*X1 + 13.5448*X2 -16.8289*X3 + 40019406.0144)

Berdasarkan tabel 6 hasil uji jangka panjang hasilnya dengan menggunakan model ARDL pada tabel tersebut maka dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$\text{Pendapatan Perkapita} = 40019406 + 1.540416 * X1 + 13.54480 * X2 - 16.82889 * X3$$

Adapun Interpretasi persamaannya adalah sebagai berikut:

1. Constanta = 40019406. Adapun dari estimasi diatas diketahui apabila belanja pemerintah bidang pendidikan, upah minimum provinsi, dan penyerapan tenaga kerja konstan dalam jangka panjang maka pendapatan perkapita di Provinsi Aceh meningkat sebesar Rp40.019.406 per tahun.
2. Koefisien Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan (X1) = 1.540416. Apabila belanja pemerintah bidang pendidikan meningkat sebesar 1 miliar dalam jangka panjang maka pendapatan perkapita Provinsi Aceh akan meningkat sebesar Rp1.540.416 per tahun.
3. Koefisien Upah Minimum Provinsi (X2) = 13.54480. Apabila upah minimum provinsi meningkat sebesar 1 juta dalam jangka panjang maka pendapatan perkapita akan meningkat sebesar Rp13.544,80 per tahun.
4. Koefisien Penyerapan Tenaga Kerja (X3) = -16.82889. Apabila penyerapan tenaga kerja meningkat sebesar 1 jiwa dalam jangka panjang maka pendapatan perkapita akan menurun sebesar Rp 16.828,89 per tahun.

Pembahasan Jangka Panjang

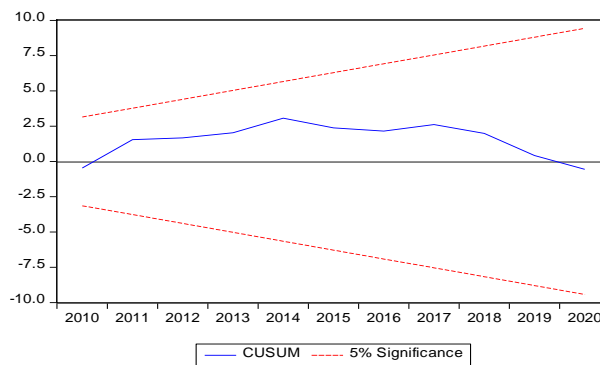
1. Variabel Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan (X1) Terhadap Pendapatan Perkapita (Y)
Berdasarkan hasil analisis jangka panjang pada variabel belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan perkapita. Pengaruh positif yang dimaksudkan disini adalah peningkatan belanja pemerintah bidang pendidikan mengakibatkan pertumbuhan ekonominya berjalan berdampingan dengan pengurangan ketidakmerataannya pendapatan. Tidak signifikannya dalam jangka panjang disebabkan oleh ketidakmerataannya pembangunan manusia yang seharusnya sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang menjadi tolak ukur dari kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Appiah, 2017) dengan hasil penelitian belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tingkat pendapatan perkapita.
2. Variabel Upah Minimum Provinsi (X2) Terhadap Pendapatan Perkapita (Y)

Pada variabel upah minimum provinsi, dalam jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita Provinsi Aceh. Dimana tandanya adalah positif walaupun nilainya tidak terlalu besar jika dibandingkan hasil dalam jangka pendek, alasan yang dapat di paparkan adalah jika para pekerja dan modal manusia semakin produktif dan kreatif maka dalam jangka panjang atas kerja sama dari pemerintah bisa saja memperluas lapangan pekerjaan yang akan menjadi alasan dari meningkatnya pendapatan perkapita. (Jaya & Kholilah, 2020). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurlaili & Cahyadin, 2019) dengan hasil penelitian upah minimum provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita di Indonesia.

3. Variabel Penyerapan Tenaga Kerja (X3) Terhadap Pendapatan Perkapita (Y)

Sedangkan pada variabel penyerapan tenaga kerja dalam jangka panjang berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Hal ini dikarenakan tingkat penyerapan tenaga kerja sangat terikat dengan tingkat perluasan lapangan kerja, jika lapangan kerja yang tersedia menurun maka tenaga kerja yang diserap juga akan menurun. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Geliga, 2019) dengan hasil penelitian tingkat penyerapan tenaga kerja yang tercermin dari jumlah penduduk yang bekerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan perkapita.

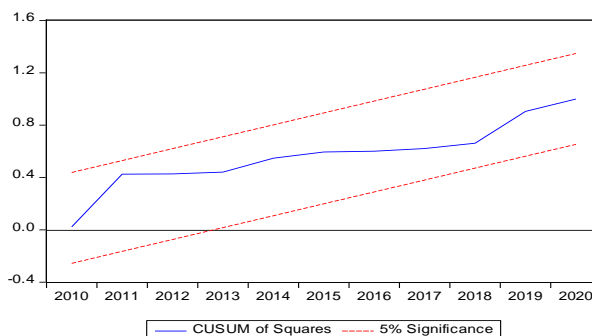
Pengujian Stabilitas Model



Gambar 6

Hasil Pengujian CUSUM Test

Berdasarkan gambar 6 hasil pengujian CUSUM Test dapat di jelaskan yaitu plot kuantitas W_r tidak berada di atas garis batas pada tingkat signifikan 5%, plot tersebut membentuk suatu garis linier.



Gambar 7

Hasil Pengujian CUSUMQ Test

Gambar 7 hasil pengujian CUSUMQ dapat dijelaskan yaitu plot kuantitas S_r berada diatas garis batas pada tingkat signifikan 5%, plot tersebut membentuk suatu garis linier.

Berdasarkan hasil kedua uji stabilitas model di atas bisa ditarik kesimpulannya jika koefisien hasil regresi bersifat stabil.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pada variabel belanja pemerintah bidang pendidikan dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan perkapita Provinsi Aceh.
2. Pada variabel upah minimum provinsi dalam jangka pendek berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan perkapita Provinsi Aceh dalam pada jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita Provinsi Aceh.
3. Pada variabel penyerapan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan perkapita Provinsi Aceh.
4. Pada variabel Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Penyerapan Tenaga Kerja berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan perkapita.

Hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan :

1. Untuk Pemerintah, Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, bukan hanya perlu adanya peningkatan dalam belanja pemerintah bidang pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, tetapi juga mencari strategi baru untuk meningkatkan pendapatan perkapita yaitu salah satunya dengan lebih membuka kesempatan kerja kepada masyarakat supaya tenaga kerja yang diserappun semakin bertambah agar pendapatan perkapita mengalami peningkatan.
2. Untuk masyarakat, diharapkan untuk semakin produktif, baik dari segi skill maupun pengembangan kemampuan lainnya yang menjadi salah satu penunjang peningkatan pendapatan perkapita.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan periode dengan periode waktu penelitiannya lebih panjang lagi, tujuannya yaitu untuk memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Dan diharapkan dapat menambah atau menggunakan variabel bebas lain selain variabel bebas yang telah ada dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidar, N. (2014). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Pendapatan Per Kapita Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 1(November 2014), 70–78.
- Appiah, E. N. (2017). The Effect of Education Expenditure on Per Capita GDP in Developing Countries. *International Journal of Economics and Finance*, 9(10), 136. <https://doi.org/10.5539/ijef.v9n10p136>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Aceh Dalam Angka 2021*. BPS. Provinsi Aceh.
- Darmayanti, L. D., & Rustariyuni, S. D. (2019). Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap AHH Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 125–146. <https://core.ac.uk/download/pdf/32650190.pdf>
- Fadhilah, N., & Raditya, S. (2017) Pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL). *"Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 4: 833-47
- Geliga, M. g. (2019). Peranan Industri Besar, Sedang Dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Per Kapita Di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(6), <https://doi.org/1305010374.pdf>
- Gujarati, D., & Porter, D. (2012). *Dasar Dasar Ekonometrika*. Selemba Empat.

- Hasbi, A. R., AP, A. D., & Salju. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Pendapatan Perkapita Di Kabupaten Luwu Timur. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 8(1). <https://doi.org/10.35906/je001.v8i1.332>
- Hidayat, R. F. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesempatan kerja di Provinsi Jawa Tengah tahun 1991-2020. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 19(2). <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v19i2.887>.
- Jamaludin, & HijriJuliansyah. (2020). Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pendapatan Perkapita Indonesia. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, X(September), 1–12.
- Jaya, T. J., & Kholilah. (2020). Effect of Gross Domestic Regional Bruto, Provincial Minimum Wage, and Investment on Labor Absorption. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 9(3), 236. <https://doi.org/10.26418/jebik.v9i3.42642>
- Junaedi. (2016). Analisis Pengaruh Investasi, Belanja Pemerintah, Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi*, 14(2), <https://doi.org/9781509028894.pdf>
- Kurniati., (2018). Determinan Konvergensi Pendapatan Perkapita. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11 (3), 66. <https://doi.org/0102138141/jebik.v9i3>.
- Kurniawan, R. (2016) Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Perkapita (Studi Kasus Kabupaten Nganjuk). 2356-6946
- Mankiw, N. (2013). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Selemba Empat.
- Maulina, U., & Andriyani, D. (2020). Pengaruh Pengeluaran pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan TPAK Terhadap IPM di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Indonesia Vol.*, 1(4), 28-37.
- Naeruz, M., & dkk. (2020). The Effect of Labor Absorption on Per Capita Income through the Growth of Indonesin Populations. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, 31-36.
- Nurlaili, R. U., & Cahyadin, M. (2019). Economic and Non-Economic Factors Effect Per Capita Income in Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 8(4), 315–323.
- Pratomo, D. S., & Adi, P. M. (2011). Kebijakan Upah Minimum Untuk Perekonomian Yang Berkeadilan. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 005(02), 269–284. <https://doi.org/10.21776/ub/jiae/2016/005.02.6>
- Susanti, E. (2019). Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Selatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2008-2017. *Jurnal Ekonomika*, 103-121.
- Susenas. (2020). *Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020*: Jakarta: Susenas Indonesia.
- Tanjung, & Devi. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Perekonomian Indonesia (Metode ARDL). *Jurnal Academia*.
- Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 78. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Wallace, & dkk. (2016). Analalisis Perhitungan Biaya Satuan dan Angka Pendidikan terhadap Kualitas Modal Manusia. *Jurnal Pendidikan*, 6465-6489, 169.
- Zaretta, B., & Yovita, L. (2019). Harga Saham, Nilai Tukar Mata Uang Dan Tingkat Suku Bunga Acuan Dalam Model Autoregressive Distributed Lag (Ardl). *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 9–22. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v4i1.2318>